



"INONG" ACEH: PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DAN RUANG PUBLIK DI ACEH

Mirza Adia Nova¹, Putri Syam², Syalva Witria³

^{1,2}Universitas Teuku Umar Aceh Barat

³Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding aauthor: mirzaadianova@utu.ac.id

Abstract:

This article analyzed about women's participation in development and the public sphere is important in inclusive and sustainable community development. In Aceh, a province with a strong cultural and religious background, issues of gender and women's leadership are of particular interest. Strong cultural norms and social demands often limit women's access to public space and decision-making. This research aims to understand women's contributions to development and the public sphere and the challenges faced, focusing on gender issues and typologies of women's leadership. This study used qualitative research methods by conducting in-depth interviews, participatory observation, and document analysis to collect data. The results show that women's participation in development and the public sphere in Aceh still faces significant challenges. The results show that women's participation in development and the public sphere in Aceh has important implications for achieving inclusive and sustainable development. The research also revealed several typologies of emerging women's leadership, such as community, social, and political leadership. These have played an important role in positive change in various areas, including education, health, economic empowerment, and local decision-making. This women's leadership is driving more equitable and inclusive social change.

Keywords: Women's Leadership; Development; Public Space; Acehnese Women; Women's Emancipation.

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ruang publik merupakan topik penting dalam konteks pengembangan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Di Aceh, provinsi yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang kuat, isu-isu gender dan kepemimpinan perempuan menjadi aspek yang menarik untuk diteliti. Norma-norma budaya yang kuat dan tuntutan sosial sering kali membatasi akses perempuan ke ruang publik dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontribusi perempuan dalam pembangunan dan ruang publik serta tantangan yang dihadapi, dengan fokus pada isu gender dan tipologi kepemimpinan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ruang publik di Aceh masih menghadapi tantangan yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ruang publik di Aceh memiliki implikasi penting bagi

pencaapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian juga mengungkapkan beberapa tipologi kepemimpinan perempuan yang muncul, seperti kepemimpinan komunitas, kepemimpinan sosial, dan kepemimpinan politik. Hal ini telah memainkan peran penting dalam membawa perubahan positif di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengambilan keputusan lokal. Kepemimpinan perempuan ini mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Perempuan; Pembangunan; Ruang Publik; Perempuan Aceh; Emansipasi Perempuan.*

Pendahuluan

Perbedaan antara pria dan wanita adalah kodrat dari Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan sangat beragam. Perbedaan tersebut tidak dapat dipahami sebagai perbedaan yang akan menguntungkan satu pihak. Bahkan dengan adanya perbedaan tersebut dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sikap saling melengkapi satu sama lainnya.

Namun, pada beberapa daerah di Indonesia, telah menjadi rahasia umum bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan menjadi permasalahan yang tidak akan ada solusinya. Perempuan sering diperlakukan sebagai kelompok kedua (subordinat) dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam sektor domestik maupun publik.

Berbagai macam stigma yang dikenakan pada perempuan sehingga perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hal menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Padahal setiap penciptaan Tuhan telah memiliki peran dan fungsinya masing-masing.

Pada beberapa kasus, perempuan juga dianggap sebagai sumber masalah seperti kekerasan, kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Hal ini tidak hanya terjadi pada masa lalu, namun pada masa sekarang pun kerap terjadi hal demikian. Mengingat sekarang adalah era emansipasi perempuan. Keaktifan peran perempuan masa lalu sangat dibatasi, hal ini dikarenakan adanya nilai-nilai yang harus dikedepankan yaitu nilai-nilai tradisional. Bahkan di suatu daerah ada yang memosisikan perempuan sebagai pemeran di balik layar.

Pada era sekarang peran dan fungsi perempuan masih sangat dipengaruhi oleh kultur atau budaya masa lalu. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kiprah perempuan hari ini yang ditandai dengan adanya indikator bahwa perempuan lemah dalam partisipasi di ruang publik karena adanya anggapan hal demikian.

Diantara faktor yang menyebabkan terjadi kesenjangan bahwa perempuan adalah manusia kedua dalam peran dan fungsinya dalam masyarakat adalah adanya bias penafsiran tekstualis yang dilakukan oleh penafsir yang sudah menjadi budaya patriarki. Seperti halnya dalam rumah tangga, adanya perbedaan tugas antara anak laki-laki dan perempuan yang tidak sama sehingga akan melahirkan perbedaan pemahaman dalam masyarakat. Kemudian juga kurangnya aktifnya kaum perempuan di bidang publik dibandingkan dengan kaum laki-laki. Sehingga lahirlah gerakan emansipasi perempuan atau perjuangan tentang perlu adanya

kesetaraan gender yang pada akhirnya melahirkan gerakan feminisme. Gerakan ini lahir untuk mencapai kesetaraan gender dalam ruang lingkup politik, pribadi sosial juga ekonomi .

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan para perempuan mulai bangkit dari stigma-stigma negatif. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya para perempuan yang terlibat di wilayah publik. Sehingga hal ini menjadi pembuktian bahwa perempuan mampu dan berkompeten dalam menjalani peran-peran yang diberikan, baik itu di ranah publik maupun di ranah domestik.

Pada era sekarang negara telah hadir untuk mengatur harus adanya keterlibatan perempuan pada semua sektor kehidupan, yakni pembangunan, pendidikan, politik, kesehatan, dan bahkan pada sektor ketenagakerjaan. Hal ini diharapkan bahwa perempuan mempunyai pandangan yang sama dengan kaum laki-laki yaitu sebagai mitra dari kaum laki-laki. Terlibatnya kaum perempuan dalam semua sektor kehidupan menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Tanpa peran dari kaum perempuan negara tidak mungkin bisa sejahtera dan mencapai kemajuan. Apalagi jika kaum perempuan masih dibiarkan tertindas, tersisih, tertinggal dan dianggap tidak penting dalam masyarakat. Maka dari itu, peranan dari kaum perempuan sebagai warga negara maupun bagian dari keluarga dalam masyarakat mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam segenap kegiatan pembangunan di seluruh sektor kehidupan sebagaimana amanah Undang-Undang 1945 tepatnya pada Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) yang mengeskan bahwa baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Selain itu, Pasal 45 dan Pasal 46 UUD 1945 juga menyatakan bahwa hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia dan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan pemilihan presiden dan wakil presiden harus memperhatikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan . Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 mengakui hak dan kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Pada tahun 1979 dalam konferensi yang diadakan oleh komisi kedudukan perempuan PBB telah disetujui mengenai penghapusan dalam segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Dalam konferensi ini terdapat lima hak utama perempuan, yaitu hak dalam ketenagakerjaan, hak dalam bidang kesehatan, hak dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga dan hak dalam ruang publik dan politik .

Dalam perjalanan waktu para kaum perempuan telah mulai bangkit dari ketertinggalan yang pernah mereka jalankan. Anggapan-anggapan negatif yang selama ini melekat pada perempuan mulai dihilangkan. Sehingga sekarang dapat dilihat dengan banyaknya para perempuan yang menggeluti banyak profesi di bidang publik. Hal ini sebagai pembuktian bahwa perempuan sanggup dan mampu menjalani peran dalam semua sektor kehidupan seperti halnya kaum laki-laki.

Ada banyak kontribusi perempuan dalam berbagai bidang politik, pendidikan,

pembangunan dan lainnya. Dalam bidang politik, pemerintah sudah menetapkan 30% keterlibatan perempuan. Namun, dalam hal ini hasil dari kontestasi politik belum dapat dirasakan secara maksimal, tetapi paling tidak bahwa perempuan mempunyai hal yang sama dengan laki-laki merupakan prestasi yang luar biasa.

Pentingnya para perempuan berperan dalam sektor pembangunan dan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Maka dari itu perempuan dapat menjadi pelaku strategis dalam pembangunan baik di level daerah, nasional maupun internasional.

Peran kaum perempuan sebagai aktor adalah aset serta potensi yang sangat berharga dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Khususnya dalam sektor pembangunan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan akan sangat dibutuhkan dalam pembangunan terutama SDM akan perempuan itu sendiri..

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah tokoh perempuan Aceh yang aktif berperan dalam bidang pendidikan dan pemerintahan masing-masing 1 sampel.

Pembahasan

Isu Gender dalam Pembangunan

Dalam pembahasan tentang sektor pembangunan akan selalu menjadi isu penting di suatu negara. Tidak terbatas pada negara maju bahkan negara berkembang pun menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas, bahkan negara terbelakang sekalipun. Penting dibahas dikarenakan memiliki tujuan yang jelas yaitu kesejahteraan akan suatu negara. Pemerataan kesejahteraan akan membuat suatu negara lebih maju dari sebelumnya.

Pada intinya, pembangunan seharusnya memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin. Namun, persepsi yang ada saat ini adalah bahwa pembangunan telah memperlebar kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya, antara laki-laki dan perempuan, dan antara kelas penguasa dan rakyat biasa.

Dalam hal menunjang pembangunan yang lebih baik, partisipasi oleh masyarakat yang terlibat akan sangat menentukan. Keterlibatan aktif dari masyarakat baik laki-laki maupun perempuan akan sangat mempengaruhi sektor kemajuan pembangunan. Dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) disebutkan bahwa partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat

dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata¹. Hal ini dapat diwujudkan dengan sama-sama dalam memikul beban tanggung jawab. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan sering dikaitkan dengan usaha membangkitkan rasa memiliki terhadap semua fasilitas yang dibangun. Sehingga hal ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability*). Keberhasilan suatu pembangunan dapat diukur dengan tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan lainnya dapat teratasi.

Semakin maraknya suara untuk pembebasan kaum perempuan oleh kaum feminisme terhadap gerakan gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah mencuat dalam beberapa tahun belakangan. Namun, pembangunan tetaplah hal yang universal. Artinya perempuan bukanlah hal yang substansi dalam pembangunan namun perempuan harus dilihat juga secara keseluruhan dalam sektor pembangunan. Terdapat relasi antara gender dengan sektor pembangunan yakni dalam hal konsep atau metode yang berpengaruh pada kehidupan yang lebih spesifik pada laki-laki, perempuan dan bahkan keduanya. Sehingga pembahasan tentang gender dalam sektor pembangunan merupakan salah satu isu yang akan menuntut keadilan konstruksi sosial maupun kultural antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, tugas, status dan karakter harus dicapai. Pembangunan adalah proses mengubah suatu masyarakat dari kondisi sosial budaya tertentu menjadi sesuatu yang lebih berguna untuk menghilangkan keterbelakangan. Oleh karena itu, gender dan pembangunan memiliki hubungan yang simbiosis mutualisme.

Dalam hal ini posisi perempuan dalam pembangunan menjadi subjek pembangunan atau partisipan. Namun dalam realitas perempuan menjadi objek pembangunan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara *pertama* masih kuatnya faktor sosial dan budaya *patriaki* yang menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki, *kedua* masih banyak aturan, kebijakan-kebijakan dan program pembangunan yang peka terhadap perempuan, *ketiga* belum adanya kesadaran gender pada pengambil kebijakan dalam merumuskan perencanaan yang berjalan, *keempat* kurang kesadaran, kemauan dan kompetensi perempuan sendiri dalam melibatkan diri dalam ruang publik.

Menurut laporan "*Engendering Development*", kesetaraan gender mengacu pada kesetaraan hak, sumber daya, dan suara antara perempuan dan laki-laki. Laporan ini menekankan pentingnya kesetaraan *gender* dalam hasil pembangunan dan menyarankan agar para pembuat kebijakan memiliki sejumlah instrumen kebijakan untuk mendorong kesetaraan *gender*. Juga menyoroti tentang kemiskinan memperburuk kesenjangan gender dan bagaimana ketidaksetaraan gender membatasi kapasitas perempuan dan anak perempuan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Laporan ini menyarankan agar para pembuat kebijakan memiliki sejumlah instrumen kebijakan untuk mendorong kesetaraan

¹ Pusat Pengkajian MPR RI, "Reformulasi GBHN Dan Upaya Memperkokon Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional" (Jakarta, 2014), Reformulasi GBHN dan Upaya Memperkokon Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

gender dan meningkatkan hasil-hasil kebijakan ².

Berdasarkan hasil kajian laporan "*Engendering Development*", Triana Sofiani menyarankan pemerintah agar memperhatikan kesetaraan gender dengan mengambil langkah-langkah yang konkrit. *Pertama* diperlukan peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu mewujudkan kesetaraan gender. *Kedua* harus meningkatkan kualitas peran serta kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam meningkatkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan masyarakat ³.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya upaya dan langkah atau strategi dalam merealisasikan kesetaraan dengan menggunakan metode atau pendekatan. Beberapa pendekatan dalam konteks pembangunan perempuan dalam meretas masalah terkait posisi perempuan diantaranya adalah *Women In Development (WID)*, yaitu sebuah program peningkatan peranan perempuan yang menitikberatkan pada upaya mengejar ketertinggalan perempuan sehingga perempuan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan berperan aktif sama dengan laki-laki dalam bidang Pendidikan, pekerjaan dan aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. *Kedua Gender And Development (GAD)* yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan untuk melihat

Perempuan sebagai subjek pembangunan, agen perubahan dengan menitikberatkan pada pola hubungan setara perempuan dan laki-laki. Setara dengan uraian tersebut upaya peningkatan posisi dan peran perempuan di dalam pembangunan menjadi *mainstream* dalam berbagai bidang.

Dalam usaha memberikan ruang bagi perempuan dalam pembangunan dilakukan dengan berbagai macam strategi atau pendekatan yang di atas. Guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan, terlebih utama dalam pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Sehingga akan dapat memiliki replikasi yang tinggi tidak hanya berdampak pada pembangunan keluarga yang berkualitas, akan tetapi juga meningkatkan peran perempuan dalam mengambil keputusan, seperti, dalam keluarga, saling mendukung dalam penyelesaian tugas domestik. Berdialog dalam pengambilan keputusan. Sehingga dalam masyarakat, tidak ada lagi penempatan perempuan dalam ranah domestik sementara laki-laki di ruang publik. Dalam kegiatan pada sektor pembangunan, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan mapupun menikmati hasilnya bersama.

² Edgardo Bucciarelli et al., *A World Bank Policy Research Report, "Angendering Development: Through Gender Equality in Right, Resources and Voice"* (London: Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011), <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811004198>.

³ Triana Sofiani, "Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan," *Jurnal Muwazah* 1, no. 1 (2009).

Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam pembangunan juga dapat dilihat dari sudut pandang perempuan sebagai pelaku/pelaksana. Artinya, perempuan tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek pembangunan, baik sebagai pengontrol, pengambil keputusan, konsultan, maupun penerima manfaat. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh pola relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan, yang dibentuk oleh kultur dan struktur, serta diperkuat oleh rendahnya sumber daya manusia perempuan. Perempuan harus segera mengasah kemampuannya dalam mengejar ketertinggalannya dari laki-laki melalui berbagai inisiatif yang dilakukan, seperti meningkatkan kemampuan perempuan, untuk mewujudkan peran perempuan dan laki-laki yang harmonis.

Perempuan dapat berkembang sebagai anggota masyarakat dengan memperluas pengetahuan dan kemampuannya di semua aspek kehidupan. Peningkatan peran dan posisi perempuan dalam pembangunan dapat berujung pada posisi dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Selain menjadi anggota legislatif dan pekerjaan penting lainnya. Meningkatkan kesejahteraan perempuan. Terutama dalam hal menjaga kodrat peran dan melindungi harkat dan martabat perempuan. Sehingga perempuan memiliki kepribadian, kuat dan teguh pendirian, mandiri, dapat membedakan mana yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsanya, serta dapat mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya, serta mengedepankan kebersamaan dan kesetiakawanan.

Perempuan dapat mengembangkan dirinya dengan baik sebagai anggota masyarakat dengan memperluas pengetahuan dan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan. Peningkatan peran dan posisi perempuan dalam pembangunan dapat mengarah pada posisi dalam pengambilan keputusan atau sebagai penentu kebijakan. Selain menjadi anggota legislatif dan posisi-posisi krusial lainnya. Meningkatkan kesejahteraan perempuan. Terutama dalam hal menjaga kodrat peran dan menghormati harkat dan martabat perempuan. Agar perempuan memiliki kepribadian, percaya diri dan teguh pendirian, tidak bergantung pada orang lain, dapat menentukan apa yang terbaik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsanya, serta dapat mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya, serta mengutamakan kebersamaan dan kesetiakawanan. Kemudian ada masalah meningkatkan ketahanan mental dan spiritual perempuan. Perempuan harus mampu menghadapi perubahan dan mengatasi dampak negatif globalisasi dengan meningkatkan ajaran agama.

Berdasarkan studi kasus, peran dan tugas laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang berbeda. Ada beberapa peran dan tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh laki-laki, namun tidak dapat dilakukan oleh perempuan, begitu pula sebaliknya. Namun, peran gender dapat dialokasikan dan disesuaikan berdasarkan struktur sosial yang dibutuhkan, seperti pekerjaan laki-laki security, tukang bangunan, sopir dapat dilakukan oleh perempuan, begitu juga

pekerjaan perempuan seperti koki, pekerja asisten rumah tangga juga dapat dilakukan oleh laki-laki.

Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2008 dalam penelitian Hasanah, kontribusi perempuan dalam memulihkan sektor perikanan Indonesia melampaui 2,3 juta orang. Ini berarti banyak perempuan Indonesia, baik petani maupun nelayan, yang bertanggung jawab atas produksi pangan. Namun, mereka masih memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya produksi seperti air, lahan, fasilitas produksi pertanian dan perikanan, serta pasar⁴.

Tipologi Perempuan Aceh dalam Ruang Publik

Ada banyak peranan perempuan yang telah berkiprah dalam sektor publik, dalam rangka berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sebuah negara. Para perempuan diberikan kesempatan untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ada beberapa penyebab yang sangat mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam sektor publik. Diantaranya adalah adanya pengalaman keterlibatan diri dalam keluarga yang merupakan tokoh masyarakat pada masa yang lalu. Sehingga keberadaannya pada sektor publik merupakan hal yang sudah biasa.⁵ Kemudian juga dipengaruhi oleh kualitas pengetahuan atau pendidikan yang didapatkan oleh seorang perempuan, yang mana dengan pengetahuan tersebut ia mampu berada di tengah-tengah masyarakat untuk merealisasikan harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam sejarah Aceh bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah hal yang asing atau hal yang baru. Telah tertulis dalam sejarah bahwa ada banyak perempuan-perempuan Aceh yang telah terbukti mampu keahliannya dalam memimpin. Telah ada beberapa perempuan yang berhasil menguasai dan menjalankan pemerintahan bahkan menjadi pahlawan dalam medan peperangan.

Potensi yang dimiliki oleh perempuan Aceh sejak dahulu dapat dilihat dalam sejarah Aceh, di mana perempuan Aceh memiliki peranan penting baik bidang pemerintahan maupun dalam medan peperangan.

Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh pada masa lampau semua berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah yang menjadi sumber hukumnya. Sesuai dengan ajaran Islam tersebut, maka lahirlah pemimpin-pemimpin dari kaum perempuan yang kedudukannya sama dengan laki-laki. Sehingga banyak muncul tokoh-tokoh perempuan baik menjadi pemimpin pemerintahan maupun sebagai pahlawan dalam peperangan⁶.

⁴ Ulfatun Hasanah and Najahan Musyafak, “Fender and Politics: Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2017).

⁵ M. Ikhwan, *Menakar Syariat Tuhan di Ruang Publik: Membaca Konteks Indonesia dalam Mozaik Pemikiran Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Malang*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

⁶ Emi Suhaimi, *Wanita Indonesia Sebagai Negarawan Dan Panglima Perang* (Banda Aceh: Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy, 1993).

Kepemimpinan perempuan di Aceh telah dibuktikan oleh beberapa sultanah. Mereka berhasil membawa Aceh ke puncak kejayaan dalam kepemimpinan perempuan. Dimulai dari kepemimpinan Ratu Shafiatuddin yang memimpin selama 35 tahun. Tidak ada yang meragukan kepemimpinan Ratu Shafiatuddin (1641-1675), ia adalah pemimpin perempuan Aceh yang berhasil menjaga kestabilan kerajaan peninggalan ayah dan suaminya⁷. Begitu juga generasi sepeninggalan ratu Shafiatuddin yaitu Naqiatuddin (1675-1678), Zakiatuddin (1678-1788), dan Keumalat Shah (1688-1699). Para perempuan tersebut telah membuktikan bahwa ia mampu menduduki jabatan sebagai pemimpin dalam waktu yang relatif lama.

Hari ini, Aceh juga telah melahirkan para perempuan-perempuan yang terbukti mampu memimpin baik dari sektor pemerintahan maupun sektor pendidikan. Beberapa tokoh perempuan tersebut adalah Illiza Sa’aduddin Djamal saat ini sebagai anggota DPR-RI dari Aceh dan Marniati sebagai Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia (UII) Banda Aceh.

Seorang perempuan yang bernama Illiza Sa’aduddin Djamal telah memulai kiprahnya dari sejak berusia remaja. Illiza mengakui bahwa sering kali diajak sang ayah untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepartaian yang pada saat itu ayahnya aktif sebagai kader partai PPP di Aceh. Kemudian Illiza pernah terpilih anggota DPRK Banda Aceh periode 2004-2006. Selanjutnya terpilih menjadi wakil walikota Banda Aceh periode 2014-2017 yang pada masa akhir jabatannya pada saat itu menduduki posisi sebagai walikota. Hingga sampai masa saat ini Illiza aktif sebagai anggota DPR RI perwakilan dari Aceh.

Dari segi tipe kepemimpinannya, Illiza mengedepankan nilai-nilai demokratis. Menurutnya, hal ini menjadi modal besar jika ingin menjadi seorang pemimpin. Dengan tipe tersebut akan mampu menyerap aspirasi-aspirasi langsung dari masyarakat. Kemudian kepemimpinan Illiza juga bertipe partisipatif, artinya keterlibatan langsung dengan masyarakat sangat penting. Illiza menyakini bahwa kedekatan dengan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam memimpin.

Selain Illiza, ada sosok perempuan yang bernama Marniati. Marniati mendapat gelar sebagai Profesor (Adjunct) sebagai bukti keberhasilannya dalam sektor pendidikan. Sebagai Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia (UII) Banda Aceh, Marniati mempunyai cita-cita yang sangat tinggi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Sehingga Marniati terpilih menjadi salah-satu tokoh perempuan nasional yang menginspirasi perempuan lainnya.

Dari tipe kepemimpinannya, Marniati termasuk ke dalam tipe kharismatik, yaitu berusaha menumbuhkan kepercayaan dari orang lain yakni rekan dan para mahasiswa tentang pentingnya cita-cita yang tinggi. Terlebih khusus bagi kaum perempuan. Bahwa kaum perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan. Kemudian tipe otoritatif, menurutnya hal ini diperlukan untuk menyatukan cita-cita bersama. Sehingga ketegasan dan disiplin yang tinggi dalam memimpin menjadi hal yang penting untuk diterapkan. Namun, Marniati juga mengedepankan tipe demokratis dalam kepemimpinannya, yaitu melibatkan berbagai pihak dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

⁷ Amirul Hadi, *Aceh, Sejarah, Budaya Dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

Dalam hal eksistensi kaum perempuan di sektor publik, Marniati mengatakan bahwa visi, pendidikan, pengetahuan dan kolaborasi dengan berbagai pihak harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

PENUTUP

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan telah menjadi budaya yang diwariskan sejak zaman dahulu. Budaya *patriarki* telah menyudutkan peran perempuan sebagai manusia kedua dalam masyarakat. Berbagai kesempatan telah dilewati pihak laki-laki tanpa melibatkan peran perempuan. Hal ini menjadi sebuah ketimpangan dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam mewujudkan cita-cita pembangunan di suatu negara maka tidak ada pilihan lain, selain memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan sebagaimana kaum laki-laki miliki. Dengan mengisi kekosongan baik dari segi sumber daya manusia maupun ketersediaan peran perempuan dalam sektor publik harus dioptimalkan.

Pandangan bahwa perempuan adalah makhluk *termarjinalkan* sudah harus dihilangkan. Mengingat tujuan dari terlaksananya pembangunan suatu negara harus terbebas dari kemiskinan, penindasan, kebodohan, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Sehingga cita-cita dari pembangunan dapat teralisasi dengan baik. Dalam penelitian ini ada beberapa tokoh perempuan Aceh yang telah penulis teliti, yaitu Illiza Saaduddin Djamal dan Marniati. Kedua tokoh tersebut aktif terlibat dalam sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bucciarelli, Edgardo, Fbrizio Muratore, Lacopo Odoardi, and Carmen Pagliari. *A World Bank Policy Resear Chrepor, “Angendering Development: Thorough Gender Equality in Right, Resources and Voice.”* London: Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811004198>.
- Erusmiati, and Busro. “Gerakan Feminisme Islam Di Era Digital: Analisis Bibliometrik Pada Database Demensions.” *Gunung Djati Conference Series 23* (2023).
- Hadi, Amirul. *Aceh, Sejarah, Budaya Dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Hasanah, Ulfatun, and Najahan Musyafak. “Fender and Politics: Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik.” *Sawwa: Jurnal Studi Gende 12*, no. 3 (2017).
- Ikhwan, M. *Menakar Syariat Tuhan di Ruang Publik: Membaca Konteks Indonesia dalam Mozaik Pemikiran Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Malang*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021).
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Kemenpppa. “5 Hak-Hak Utama Perempuan.” [Kemenpppa.go.id](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan), 2017.

Nova, Mirza Adia. 2022. “Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa (Studi Feminisme dan Gender Pada Perempuan Gampong Blangkrueng Kabupaten Aceh Besar).” *Al-Ukhwah : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 1(1) : 1-13.

PMK, Kemenko. “Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan.” Kemenko PMK, 2019. <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>.

RI, Pusat Pengkajian MPR. “Reformulasi GBHN Dan Upaya Memperkokon Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.” Jakarta, 2014. Reformulasi GBHN dan Upaya Memperkokon Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sofiani, Triana. “Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan.” *Jurnal Muwazah* 1, no. 1 (2009).

Suhaimi, Emi. *Wanita Indonesia Sebagai Negarawan Dan Panglima Perang*. Bnada Aceh: Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy, 1993.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” n.d.